

## PENGARUH PEMBAYARAN PAJAK DAERAH TERHADAP PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG

Sugiharto<sup>1</sup>, Dimas Pratama Putra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Dosen jurusan Akuntansi, Universitas Tridianti, Sumatera Selatan  
Email : <sup>1</sup>sugihartoabas05@gmail.com, <sup>2</sup>dimaspratamaputra@univ-tridianti.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

Submitted:  
01/03/2022

Revised:  
10/05/2022

Accepted:  
18/06/2022

Online-Published:  
30/06/2022

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pembayaran pajak Daerah terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan rumusan masalah asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kecamatan kertapati yang diambil dengan metode purposive sampling sebanyak 40 pegawai dengan dilakukan pengisian kuesioner. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian Pembayaran pajak daerah berpengaruh terhadap pelayanan pemerintah daerah kota Palembang, hal ini terlihat dari hasil uji t signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$  0,05 yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Koefisien korelasi yang menyatakan keeratan hubungan adalah kuat dan positif sebesar 0,736. Dengan koefisien determinasi sebesar 0,541 atau 54,1 persen, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis yang menyatakan pembayaran pajak daerah berpengaruh terhadap pelayanan pemerintah daerah kota Palembang dapat diterima.

**Kata Kunci:** Pembayaran Pajak Daerah, Pelayanan Pemerintah Daerah

### ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the effect of local tax payment on government services in the city of Palembang. The research method used in this study is a qualitative descriptive with associative problem formulation. The population used in this study were all employees in the sub-district of kertapati taken with purposive sampling method as many as 40 employees by filling out a questionnaire. The technique used in this research is linear regression. Based on the result of this research, regional tax payments influence local government services in the city of Palembang, this can be seen from the results of the t-test that the significance is smaller than 0.05, which means  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted. The correlation coefficient which states the closeness of the relationship are strong and positive at 0.736. With a coefficient of determination of 0.541 or 54.1 percent, the rest is influenced by other variables not examined in this research. The conclusion of this research states that the hypothesis which states that local tax payments influence local government services in the city of Palembang is acceptable.

**Keywords:** Payment of Local Taxes, Local Government Services

### A. PENDAHULUAN

Pemerintah (*Government*) merupakan pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintah dapat juga diartikan sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian atau kota dan sejenisnya. Pemerintah dapat dilihat dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legi slatif, sedangkan dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif.

Pemerintah ini terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Presiden yang dibantu wakil presiden beserta para menteri. Sedangkan

Pemerintah Daerah dibagi menjadi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Pemerintah Daerah Provinsi meliputi gubernur dan perangkat daerah yang meliputi sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota terdiri atas Bupati, Wali kota dan perangkat Daerah yang meliputi sekretaris daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota erat kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya kota Palembang pada tahun 2022 sebesar Rp 3,84 Triliun lebih rendah dibandingkan APBD 2021 sebesar Rp 4,17 Triliun (Bisnis.com Palembang). Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Palembang ini mengalami penurunan, dikarenakan antara lain adanya pembayaran pajak daerah yang menurun khususnya pajak daerah kabupaten kota. Pajak ini terdiri dari ; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak Parkir (IAI, 2016).

Penurunan ataupun Peningkatan Pembayaran Pajak Daerah erat pula kaitannya dengan Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota Palembang, hal ini sejalan dengan (MJH. Smeets,2016) yang menyatakan Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pembayaran Pajak terutama Pajak Daerah Kabupaten/Kota dapat dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dipungut oleh pemungut pajak (UU.RI, No. 34, Th. 2000).

Dibayar sendiri dimana wajib pajak membayar sendiri pajaknya di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

Ditetapkan oleh kepala Daerah dimana kepala daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD, apabila SKPD tidak atau kurang diayar setelah lewat waktu paling lama tiga puluh hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 (dua) persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pembayaran pajak daerah bisa pula dipungut oleh pemungut pajak, dimana dalam pemungutan pajak daerah tidak boleh diborongkan dan ada dokumen yang dipersamakan ataupun yang ditetapkan peraturan walikota, misalnya karcis dan nota perhitungan. Dari semua pembayaran pajak daerah yang dilakukan wajib pajak akan berpengaruh terhadap pelayanan pemerintah atau pun pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan (Kepmenpan no. 14 tahun 2017). Pelayanan publik ini merupakan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat baik berupa pelayanan barang publik maupun jasa publik. Pelayanan publik atau Pelayanan Pemerintah dalam penelitian ini adalah Pelayanan Pemerintah kota Palembang yang diwakili oleh Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

Kecamatan Kertapati Kota Palembang dalam melaksanakan pelayanan publik telah mencapai target pencapaian pelayanan publik, hal ini terlihat dari enam program indikator pencapaian target kinerja, dari keenam

program tersebut hampir secara keseluruhan indikator sasaran mencapai 80-95% dan melampaui target capaian yang diinginkan (Renstra Kecamatan Kertapati 2019-2023). Pelayanan Publik atau pelayanan Pemerintah Kota Palembang dengan indikator yang dijadikan penelitian ini yaitu kinerja pelayanan dibidang pembangunan dan Survei kepuasan masyarat pada unit penyelenggaran pelayanan. Berbagai indikator pelayanan publik ini belum memeprihatikan kondisi optimal, hal ini terlihat dari survey pendahuluan yang erat kaitannya dengan pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang adalah : Apakah Terdapat Pengaruh Pembayaran Pajak Daerah Terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah Kota Palembang ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh Pembayaran Pajak Daerah Terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga Terdapat Pengaruh Pembayaran Pajak Daerah Terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
2. Diduga Tidak terdapat Pengaruh Pembayaran Pajak Daerah Terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

## B. METODE PENELITIAN

### Rancangan Penelitian.

Jenis dan desain penelitian yang digunakan adalah eksploratif dan kausalitas. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data-data awal tentang sesuatu (Irawan, 2007 : 101). Desain kausalitas adalah penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan sebab

akibat antara variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2011 :30).

## Variabel dan Definisi Operasional

Tabel 1. Variabel dan Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Pembayaran Pajak Daerah (X)	Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah UU RI, No. 34 th 2000	1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak 2. Ditetapkan oleh kepala Daerah 3. Dipungut oleh pemungut pajak	Ordinal
2.	Pelayanan Pemerintah Daerah Kota Palembang (Y)	Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelyunan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan Kepmenpon No. 14 tahun 2017	1. Persyaratan dan Prosedur Pelayanan 2. Biayadan waktu pelayanan 3. Spesifikasi dan Kompetensi pelayanan 4. Perilaku pelaksana 5. Penanganan pengaduan 6. Saranadan Prasarana	Ordinal

## Populasi dan sampel

Populasi bisa didefinisikan sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena (Singgih Santoso, 2017 : 4). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di Kecamatan Kertapati, Banyaknya jumlah pegawai kecamatan kertapati 53 orang pegawai PNS (Satudata.Palembang.go.id).

Tabel 2. Jumlah Pegawai PNS Kecamatan Kertapati Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No	Sub BKPD	Jumlah	Tingkat Pendidikan		
			D3	S1	S2
<b>A Kecamatan</b>					
1	Camat	1			1
2	Sekretaris Camat	1			1
	- Kasub Perencanaan dan Keuangan	1		1	
	- Kasub umum dan kepegawaian	1			1
3	Kasi Pemerintahan	1			1
4	Kasi PMK	1		1	
5	Kasi Keras	1			1
6	Kasi Terantih	1		1	
7	Kasi Pelayanan umum	1			1
8	Staf	9	1	8	
<b>B Kelurahan</b>					
1	Lurah	6	1	5	
2	Sekretaris lurah	5		5	
3	Kasi pemerintahan	3		3	
4	Kasi PMK	4		4	
5	Kasi Keras	3		3	
6	Kasi Terantih	6		6	
7	Staf	8		8	
TOTAL		53	2	45	6

Sumber : Kecamatan Kertapati Kota Palembang, 2021

Sample dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang pegawai yang ada di Kecamatan Kertapati Palembang yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sampling yang digunakan yaitu *Purposive sampling*. Dimana penarikan populasi dari 53 pegawai menjadi 40 orang dengan pertimbangan yang dijadikan sebagai objek yaitu berkaitan dengan pelayanan pemerintah kota Palembang atau pelayanan publik.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Validitas dan Reliabilitas

##### a. Uji Validitas

Pada hasil olahan data menunjukkan hasil uji validitas terhadap populasi 40 karyawan Kecamatan Kertapati dapat diketahui bahwa pembayaran pajak daerah terhadap pelayanan pemerintah Daerah kota Palembang menunjukkan data yang valid. Valid ini dapat dilihat dari hasil olahan data SPSS versi 24 pada lampiran dimana nilai signya lebih kecil dari alpa (0,05). Terdapat pula data pembayaran pajak daerah dan Pelayanan Pemerintah yang tidak valid karena nilai signifikansinya lebih besar dari alpa 0,05. Dan data yang tidak valid ini dikeluarkan untuk tidak diolah dalam pengujian pengaruh pembayaran pajak daerah terhadap

pelayanan pemerintah Daerah Kota Palembang.

##### b. Uji Reliabilitas

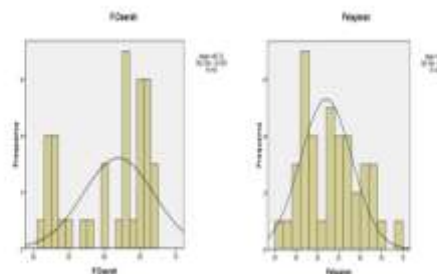
Reliabilitas dilihat dari hasil output SPSS dengan melihat hasil nilai *alpha cronbach*. Nilai *alpha cronbach* yang lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan reliabel.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pembayaran Pajak Daerah (X) dan Pelayanan Pemerintah Kota Palembang (Y)

Variabel	Nilai Alpha Cronbach	N Of Items	Keterangan
Pembayaran Pajak Daerah (X)	0,8	8	Reliabel
Pelayanan Pemerintah Kota (Y)	0,8	8	Reliabel

Sumber :Hasil olahan spss versi 24

## 2. Analisis Statistik Deskriptif



Gambar 1. Statistic deskriptif

Dari hasil olahan data dapat dinyatakan bahwa variabel Pembayaran Pajak Daerah dan Pelayanan Pemerintah Kota Palembang memiliki sebaran normal, hal ini dilihat dari kurva normal yang membentuk distribusi normal.

**Analisis statistik inferensial**

**Uji persyaratan Analisis**

**a. Uji Normalitas**

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan statistik uji *kolmogrov semirnov*. Dari hasil uji didapatkan kedua variabel tersebut adalah asympsignya lebih besar dari alpa (0,05) maka dapat dikatakan kedua variabel berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :  
 Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan statistik uji *kolmogrov semirnov*. Dari hasil uji didapatkan kedua variabel tersebut adalah asympsignya lebih besar dari alpa (0,05) maka dapat dikatakan kedua variabel berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4 Rangkuman hasil uji normalitas

No	Variabel	Nilai Asymsig (2 tailed)	Alpa =0,05	Kesimpulan
1	Pembayaran Pajak Daerah (X)	0,175	0,05	Normal
2	Pelayanan Pemerintah Kota (Y)	0,357	0,05	Normal

Sumber : Hasil olahan data spss versi 24,

**b. Uji homogenitas**

Pengujian homogenitas dilakukan menggunakan uji *chi square*. Uji ini dilihat dari asimsig *chi square* . Asimsig *chi square* lebih besar dari alpa (0,05) maka dapat dikatakan homogen.

Tabel 5 Rangkuman hasil uji homogenitas

No	Variabel	Nilai Asymsig (2 tailed)	Alpa =0,05	Kesimpulan
1	Pembayaran Pajak Daerah (X)	0,224	0,05	Homogen
2	Pelayanan Pemerintah Kota (Y)	0,743	0,05	Homogen

Sumber : Hasil olahan data spss versi 24

**c. Uji Linearitas**

Uji linearitas garis regresi dan simpulannya berdasarkan tingkat alpha menggunakan harga koefisien signifikansi. Apabila nilai signifikansi yang digunakan untuk menolak atau menerima Ho, maka nilai koefisien harus dibandingkan dengan tingkat alpa=0.05. Kesimpulan yang harus diambil yaitu model regresi berbentuk linear, diterima jika signifikansi dari deviation from linierity > dari alpa = 0,05 sebaliknya tidak linier jika kurang dari alpa. Untuk lineairty variabel tersebut adalah 0, 349 lebih besar dari alpa (0,05). Maka dapat dikatakan linier.

**Analisis Regresi linier sederhana**

**Pengaruh Pembayaran Pajak Daerah Terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah Kota Palembang**

Tabel 6 Hasil Uji Analisis RegresiLinier Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	64.866	11.286		4.848
	Pembayaran Pajak Daerah	.495	.117	.736	3.356

a. Dependent Variable: Pelayanan Pemerintah Daerah Kota Palembang

Dari tabel 6 di atas persamaan regresi linear untuk pengaruh Pembayaran Pajak Daerah terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah Kota Palembang adalah :

$Y = 64.866 + 0,495 X + e$ . Dari persamaan ini dapat diartikan bahwa konstanta sebesar 64.866 akan memberi pengertian bahwa jika pengaruh pembayaran pajak daerah terhadap pelayanan pemerintah daerah kota palembang adalah konstanta sama dengan nol (0), maka besarnya kemampuan pelayanan pemerintah Daerah Kota Palembang sebesar 64.866 satuan. Hal ini menginformasikan bahwa Pembayaran Pajak Daerah yang terdiri dari ;

pembayaran sendiri oleh wajib pajak, Pembayaran yang ditetapkan oleh kepala daerah, dan pembayaran yang dipungut oleh pemungut pajak memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah kota Palembang, yang dilihat dari persyaratan dan prosedur pelayanan, biaya dan waktu, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana.

Hal lainnya yaitu X, merupakan koefisien regresi dari variabel Pembayaran pajak daerah sebesar 0,495 mempunyai arti bahwa bila terjadi perbaikan pembayaran pajak daerah terhadap pelayanan pemerintah daerah kota Palembang sebesar 1 satuan, maka akan terjadi peningkatan pelayanan pemerintah daerah kota Palembang sebesar 0,495 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap.

### Koefisien korelasi

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 <sup>a</sup>	.541	.561	2.796

a. Predictors: (Constant), Pembayaran Pajak Daerah  
b. Dependent Variable: Pelayanan Pemerintah Daerah

Dari tabel 7 tersebut dapat dilihat bahwa koefisien korelasi Pembayaran pajak daerah terhadap pelayanan pemerintah daerah kota Palembang sebesar 0,736. Hal ini memberikan arti bahwa hubungan (Korelasi) Pembayaran pajak daerah terhadap pelayanan pemerintah kota Palembang adalah positif dengan tingkat keeratan hubungan yang kuat (Guilford, 1956). Ini berarti semakin tinggi pembayaran pajak maka semakin tinggi pula pelayanan pemerintah daerah kota Palembang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### Uji Hipotesis

Tabel 8 Hasil uji t Statistik

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	84.866	11.286		4.848	.000
	Pembayaran pajak daerah	.495	.117	.736	3.356	.002

a. Dependent Variable: Pelayanan pemerintah daerah kota Palembang

Berdasarkan tabel 8 di atas diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 3.356. Dengan menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 dan derajat kebebasan  $n-2$  maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  1,68 dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak karena berdasarkan perhitungan uji t di peroleh bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,356 > 1,68$ . Hal tersebut merupakan kriteria penerimaan  $H_a$  atau nilai signifikansi  $\alpha \leq 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang menyatakan Pembayaran pajak daerah berpengaruh terhadap pelayanan pemerintah Daerah kota Palembang.

### Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 <sup>a</sup>	.541	.561	2.796

a. Predictors: (Constant), Pembayaran pajak daerah  
b. Dependent Variable: Pelayanan pemerintah daerah

Dari tabel 9 di atas diperoleh nilai koefisien determinasi  $R^2$  Sebesar 0,541= 54,1%. Artinya besarnya pengaruh Variabel Pembayaran pajak daerah (X) terhadap Pelayanan pemerintah daerah kota Palembang (Y) adalah sebesar 54,1% sedangkan sisanya 45,9 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

1. Pembayaran pajak daerah berpengaruh terhadap pelayanan Pemerintah Daerah

kota Palembang. Hal ini dapat dilihat dari hasil olahan data SPSS dimana nilai t signifikansi lebih kecil dari alpa yaitu dibawah 0,05. Pembayaran pajak daerah juga mempunyai korelasi /keeratan hubungan yang kuat dan memiliki kontribusi yang cukup tinggi bagi terselenggaranya pelayanan pemerintah daerah kota Palembang.

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Hal tersebut merupakan kriteria penerimaan  $H_a$ . Yaitu Pembayaran pajak daerah berpengaruh terhadap pelayanan pemerintah daerah kota Palembang.

## 2. Saran

1. Perlunya perluasan objek pajak daerah yang dapat memberikan kontribusi pada APBD guna membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah kota Palembang.
2. Perlunya peningkatan waktu pelayanan, hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat menginginkan waktu pelayanan dalam penyelesaian pelayanan terlaksana cepat, namun terbatasnya petugas dan banyaknya kegiatan lain yang harus diselesaikan sehingga tidak sesuai dengan harapan pelayanan.
3. Diberikan *reward dan punishment* kepada wajib pajak yang membayar sendiri ,pemungut pajak dan ketetapan pajak daerah yang telah memberikan kontribusi masuknya pajak daerah kota Palembang melalui pembayaran pajak.

Agustino, 2006, *Analisis kebijakan publik*, Universisty Press Gadjah Mada Yogyakarta

Dwi Priyatno, 2018, *Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa dan Umum*, Penerbit Andi (Anggota IKAPI) , Yogyakarta

Dunn, William, 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.

Guilford, dalam buku Jalaludin Rachmat , 2005, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta

Irawan, Prasetya, 2007. *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, DIA FISIP UI, Jakarta.

IAI, 2016 *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*

Raharjo, 2017, *Perpajakan Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Singgih Santoso, 2017, *Menguasai Statistik dengan SPSS 24*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.

Sugiono, 2004, *Pedoman Penelitian*, Alfabeta, Bandung

Siti Resmi, 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus* Penerbit Salemba Empat Jakarta,

Uma Sekaran, Roger Bougie, 2018, *Metode Penelitian untuk Bisnis*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta

## E. DAFTAR RUJUKAN

Arikunto, 2005, *Manjemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.